

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam merespons isu normalisasi hubungan dengan Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae-In (2017–2022) dan Yoon Suk Yeol (2022–2024), dapat disimpulkan bahwa dinamika hubungan antar-Korea sejak berakhirnya Perang Korea hingga saat ini masih didominasi oleh ketegangan politik, rivalitas militer, dan pertarungan ideologi. Meskipun kedua negara secara formal terikat pada gencatan senjata, belum ada perjanjian damai permanen yang disepakati, sehingga hubungan bilateral kerap diwarnai oleh siklus ketegangan, keterlibatan diplomatik, serta periode stagnasi. Beberapa inisiatif normalisasi hubungan telah dilakukan, seperti pertemuan puncak antar-Korea, pembentukan kantor penghubung bersama, dan kerja sama ekonomi lintas perbatasan, tetapi upaya tersebut belum mampu menghasilkan hasil yang berkelanjutan akibat faktor politik domestik, tekanan eksternal, dan ketidaksepahaman dalam proses denuklirisasi.

Urgensi normalisasi hubungan antar-Korea menjadi penting bagi stabilitas kawasan dan kepentingan nasional kedua negara. Dari aspek keamanan, normalisasi diharapkan mampu meredakan ketegangan militer yang terus berlangsung di Semenanjung Korea dan menurunkan risiko konflik bersenjata skala besar. Dari aspek ekonomi, hubungan yang stabil antara Korea Selatan dan Korea Utara membuka peluang kerja sama di sektor industri, infrastruktur, logistik, dan energi, yang dapat berdampak positif bagi perekonomian kawasan. Sementara dari aspek kemanusiaan, hubungan yang normal merupakan prasyarat penting untuk menyelesaikan isu-isu kemanusiaan yang hingga kini masih tertunda, seperti reuni keluarga terpisah dan perlindungan warga sipil di wilayah perbatasan.

Eriza Putri Tarita, 2025

Komparasi Kebijakan Luar Negeri Moon Jae-In dan Yoon Suk Yeol dalam Upaya Normalisasi Hubungan Korea Selatan-Korea Utara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.ac.id]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kebijakan luar negeri Korea Selatan di era Moon Jae-In dan Yoon Suk Yeol dalam merespons isu normalisasi hubungan dengan Korea Utara dapat dijelaskan melalui kerangka teori poliheuristik yang menekankan dua tahapan pengambilan keputusan, yakni eliminasi heuristik dan kalkulasi rasional. Pada tahap eliminasi heuristik, masing-masing presiden melakukan penyaringan awal terhadap alternatif kebijakan berdasarkan dimensi politik domestik, ideologi, dan persepsi ancaman yang mereka prioritaskan. Moon Jae-In mengeliminasi opsi militer sejak awal karena dianggap bertentangan dengan ideologi progresif damai yang diusungnya serta berisiko tinggi terhadap stabilitas domestik dan keamanan nasional. Sebaliknya, Yoon Suk Yeol mengeliminasi opsi dialog tanpa prasyarat karena dinilai tidak efektif dalam menghadapi ancaman nyata dari program senjata nuklir Korea Utara, serta tidak sejalan dengan tuntutan politik domestik dari basis konservatif yang menginginkan kebijakan luar negeri yang tegas dan berbasis *deterrence*.

Perbedaan pada tahap eliminasi heuristik tersebut berlanjut ke tahap kalkulasi rasional. Moon Jae-In lebih memilih opsi dialog dan kerja sama diplomasi antar-Korea sebagai alternatif yang paling rasional karena memberikan manfaat politik domestik berupa peningkatan approval rating, meredakan ketegangan keamanan, dan membuka peluang kerja sama ekonomi meskipun masih terbatas akibat sanksi internasional. Sementara itu, Yoon Suk Yeol menilai pendekatan *deterrence* militer dan penguatan aliansi dengan Amerika Serikat sebagai opsi yang lebih efektif dalam membangun postur pertahanan nasional, meningkatkan legitimasi politik domestik di tengah meningkatnya ancaman militer Korea Utara, serta menjaga hubungan strategis dengan mitra utama di kawasan.

Meski kedua pemerintahan telah melalui proses pengambilan keputusan berbasis poliheuristik, normalisasi hubungan antar-Korea masih belum dapat terwujud secara permanen. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebabnya. Pertama, perbedaan eliminasi heuristik antar pemerintahan menyebabkan kebijakan

Eriza Putri Tarita, 2025

Komparasi Kebijakan Luar Negeri Moon Jae-In dan Yoon Suk Yeol dalam Upaya Normalisasi Hubungan Korea Selatan-Korea Utara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.ac.id]

luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara tidak konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Pergantian kepemimpinan selalu diiringi perubahan drastis dalam pendekatan kebijakan, sehingga upaya normalisasi kehilangan kesinambungan strategi yang diperlukan untuk membangun kepercayaan jangka panjang dengan Korea Utara.

Selain itu, ketergantungan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap dinamika konstelasi eksternal, khususnya posisi Amerika Serikat, Tiongkok, dan situasi geopolitik regional, turut membatasi ruang manuver diplomasi bilateral antar-Korea. Saat hubungan AS–Korea Utara memburuk, kebijakan inter-Korea pun cenderung stagnan atau bahkan memburuk. Moon Jae-In misalnya, tidak mampu meneruskan kerja sama ekonomi lintas-Korea akibat tekanan sanksi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan Yoon Suk Yeol mempererat aliansi militer dengan AS melalui Washington Declaration 2023, yang justru semakin memperkeras sikap Korea Utara.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah polarisasi politik domestik di Korea Selatan. Moon Jae-In mengutamakan kebijakan dialog karena didukung oleh basis progresif yang menghendaki rekonsiliasi, sementara Yoon Suk Yeol lebih memilih kebijakan deterrence militer untuk memperkuat dukungan dari basis konservatif nasionalis. Polarisasi ini menyebabkan pendekatan diplomasi antar-Korea rentan terhadap perubahan politik domestik, serta menyulitkan terbentuknya kebijakan luar negeri jangka panjang yang konsisten terhadap Korea Utara.

Tidak kalah penting, respons Korea Utara yang tidak kooperatif menjadi faktor determinan yang menghambat proses normalisasi. Meski Moon Jae-In telah berupaya membuka jalur komunikasi dan diplomasi, Korea Utara tetap melanjutkan program rudal dan nuklirnya serta memutuskan komunikasi antar-Korea pasca kegagalan KTT Hanoi 2019. Pada era Yoon Suk Yeol, ketegangan kembali meningkat seiring dengan latihan militer gabungan Korea Selatan–Amerika Serikat dan penguatan aliansi keamanan di kawasan.

Eriza Putri Tarita, 2025

Komparasi Kebijakan Luar Negeri Moon Jae-In dan Yoon Suk Yeol dalam Upaya Normalisasi Hubungan Korea Selatan-Korea Utara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.ac.id]

6.2. Saran

6.2.1. Saran Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, teori poliheuristik terbukti relevan dan dapat digunakan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara dalam isu normalisasi hubungan. Pola dua tahapan yang terdiri dari eliminasi heuristik dan kalkulasi rasional mampu menggambarkan bagaimana perbedaan kebijakan antar-pemimpin terbentuk berdasarkan faktor ideologi, persepsi ancaman, serta kondisi politik domestik yang berkembang di masing-masing periode pemerintahan. Melalui pendekatan poliheuristik, penelitian ini mampu menjelaskan bagaimana keputusan kebijakan luar negeri tidak hanya didasarkan pada perhitungan rasional terkait manfaat dan risiko semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, ideologis, dan tekanan politik domestik yang muncul dalam proses eliminasi alternatif kebijakan.

Oleh karena itu, disarankan agar penelitian-penelitian selanjutnya tetap mempertimbangkan penggunaan teori poliheuristik dalam menganalisis pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, khususnya di negara-negara demokrasi dengan tingkat polarisasi politik domestik yang tinggi. Konteks seperti ini penting untuk diteliti karena polarisasi politik domestik terbukti menjadi salah satu variabel yang berpengaruh terhadap tahap eliminasi heuristik, yang kemudian menentukan arah kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Selain itu, penelitian sejenis juga dapat diterapkan pada kasus-kasus lain di kawasan Asia Timur Laut, seperti hubungan Jepang–Tiongkok, atau di kawasan konflik lainnya di Timur Tengah dan Eropa Timur, untuk menguji sejauh mana pola pengambilan keputusan dua tahap dalam poliheuristik berlaku dalam berbagai situasi geopolitik yang berbeda.

Penelitian ini juga merekomendasikan agar riset-riset berikutnya dapat melakukan komparasi penerapan teori poliheuristik di negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda, seperti negara otoriter, semi-demokrasi, atau negara-negara di kawasan yang memiliki karakteristik politik domestik yang lebih stabil, guna melihat apakah proses eliminasi heuristik dan kalkulasi rasional berlangsung dengan pola yang serupa atau mengalami perbedaan mendasar. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian ke depan diharapkan dapat memperluas cakupan penerapan teori poliheuristik sekaligus memperkuat validitasnya sebagai salah satu pendekatan dalam studi kebijakan luar negeri kontemporer.

6.2.3. Saran Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah Korea Selatan dalam merumuskan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara di masa mendatang. Pertama, penting bagi Korea Selatan untuk membangun kesinambungan strategi diplomasi antar-pemerintahan agar kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara tidak selalu berubah drastis setiap pergantian presiden. Ketidakkonsistenan arah kebijakan ini terbukti menjadi salah satu faktor utama yang menghambat tercapainya normalisasi hubungan bilateral.

Kedua, pemerintah Korea Selatan perlu memanfaatkan jalur diplomasi bilateral secara lebih fleksibel tanpa sepenuhnya bergantung pada dinamika relasi Amerika Serikat dan Korea Utara. Meskipun aliansi dengan Amerika Serikat tetap strategis, Seoul harus memiliki ruang manuver diplomasi tersendiri yang memungkinkan dialog antar-Korea tetap berjalan bahkan ketika relasi AS–Korea Utara mengalami ketegangan.

Ketiga, kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara sebaiknya dirancang lebih inklusif dengan melibatkan partisipasi lintas-kubu politik domestik. Kebijakan yang inklusif tidak hanya mencerminkan kepentingan politik tertentu, tetapi juga

mewakili kepentingan nasional jangka panjang, sehingga peluang membangun kepercayaan dan komunikasi yang stabil dengan Korea Utara dapat lebih terbuka dan sekaligus menjaga stabilitas politik domestik.

Keempat, pemerintah Korea Selatan perlu lebih aktif mendorong kerja sama multilateral di kawasan Asia Timur Laut dengan melibatkan Tiongkok, Jepang, dan Rusia dalam agenda stabilisasi Semenanjung Korea. Mengingat normalisasi hubungan antar-Korea tidak dapat dipisahkan dari konstelasi geopolitik regional, kerja sama kawasan menjadi langkah strategis untuk menekan eskalasi ancaman militer sekaligus memperluas ruang negosiasi yang lebih konstruktif bagi kedua pihak.

Dengan mempertimbangkan saran-saran tersebut, diharapkan kebijakan luar negeri Korea Selatan ke depan dapat lebih konsisten, adaptif terhadap dinamika regional, serta efektif dalam mewujudkan perdamaian dan normalisasi hubungan jangka panjang dengan Korea Utara.